**Pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja Pegawai**

**Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar**

Oleh:

**Hilda Inayah \*)**

***Abstract***

*This research based on main problem, that is the low of Employee Performance. This conditions predicted because of has not implemented yet of Coordination elements at PBB collector (Land and Building Tax) in Pataruman District, Banjar City. Approach in this research about Coordination and Employee Performance from Public Policy and Public Administration as master theory to develop science area of public administration. Research method is explanatory survey descriptive. This method used to explain social phenomenon which in this case used to check influence of Coordination (X) as independent variable to employee performance (Y) as dependent variable. This research use quantitative analysis usage Path Analysis Method meant to know value of influence Coordination variable to Employee Performance at PBB collector (Land and Building Tax) in Pataruman District, Banjar City either through simultan and also by parsial. This research conclude that Coordination influentialy in positive and significance to Employee Performance at PBB collector (Land and Building Tax) in Pataruman District, Banjar City. That accross the board Coordination has been executed and implemented according to Employee Performance factors.*

***Keywords:*** *public administration, coordination, employee performance.*

## Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan terutama dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi yang bisa berdampak positif atau negatif. Dampak positif dapat memberi wacana baru dan membuka pandangan luas tentang berbagai kehidupan modern yang mendorong ke arah pembaruan berpikir yang mengangkat harga diri manusia lebih bernilai. Sementara dampak negatifnya, adanya kecenderungan pola perilaku bebas dengan mengedepankan kepentingan individu dan menghalalkan berbagai cara untuk meraih segala sesuatu yang menjadi hasrat dorongan kehidupan tanpa ukuran dari besarnya upah atau pendapatan yang sebesar-besarnya dengan tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Munculnya tantangan pasar bebas dan globalisasi ini diantisipasi melalui berbagai upaya melalui penguatan pada nilai-nilai budaya bangsa dengan menanamkan moralitas tinggi, agar tetap menjadi penyangga keseimbangan dan tidak meruntuhkan tatanan nilai-nilai lokal yang berakar pada nilai-nilai kehidupan sebagai bangsa yang berbudaya dengan karakter ketimuran yang dikenal dengan sifat toleran dan santun serta menjunjung tinggi sifat saling menerima dan memberi dalam tatanan sosial kemasyarakatan.

Menghadapi tantangan globalisasi ini peran pemerintah sangat dominan terutama yang berkaitan dengan usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek terutama yang menyangkut kesejahteraan sebagai fasilitas bagi penguatan institusi dalam mengimbangi tantangan global tersebut. Banyak sumber-sumber pendapatan negara yang perlu dikelola pemerintah, baik yang berbentuk pajak, retribusi dan penerimaan dari sumber-sumber lainnya untuk memperkokoh dan memperkuat diri bagi terciptanya kerjasama antar intansi satu dengan lainnya yang dilakukan antar unit kerja melalui koordinasi.

Koordinasi antar unit terkait dimaksud berupa kegiatan bersama antara satu unit dengan unit lainnya dengan satu komitmen bersama yang dalam kegiatannya tercipta kebersamaan yang disepakati untuk mencapai tujuan dengan mengambil manfaat secara bersama pula untuk kepentingan bersama diantara unit kerja yang ada. Tujuan koordinasi tiada lain untuk melakukan gerak pekerjaan agar seirama dan serasi serta menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang disepakati antar unit kerja untuk mencapai kepentingan secara bersama. Handayaningrat (1991: 117) mengemukakan pendapatnya tentang koordinasi ini sebagai berikut: “Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuan bersama”.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa koordinasi pada hakekatnya merupakan upaya penyatupaduan berbagai kegiatan maupun sasaran yang akan dicapai pada suatu unit kerja ataupun organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, setiap pegawai dalam organisasi yang dikoordinasikan dapat mencapai kinerja yang diharapkan oleh setiap individu di mana pegawai tersebut melaksanakan tugas.

Kinerja pegawai dimaksud merupakan penyelesaian pekerjaan yang berkualitas dan tepat waktu yang disertai dengan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Menurut Mahsun (2009: 25) pemahaman mengenai kinerja pegawai dikemukakan, yaitu: “Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai memenuhi standar yang baku bila mengacu pada hasil pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai hasil dan sasaran kerja sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan.

Pemahaman kinerja dapat dilakukan oleh setiap pegawai dalam tugas kerjanya, artinya seorang pegawai dapat melaksanakan kerjanya sesuai dengan tuntutan yang telah ditargetkan oleh organisasi di tempat bekerjanya dengan tujuan agar semua sasaran kerja dapat dicapai. Apabila tugas kerja dapat dicapai sesuai target, berarti pegawai tersebut telah memenuhi tugas dan kewajiban kerjanya sesuai dengan harapan, artinya kinerja pegawai telah terpenuhi, termasuk kinerja pegawai pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Kinerja pegawai di Kecamatan Pataruman ini berkaitan dengan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen yang mendukung dana perimbangan yang diterima oleh daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga segala pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota, termasuk di Kota Banjar untuk Kecamatan Pataruman pemungutannya dilakukan oleh Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen yang mendukung dana perimbangan memberi pengaruh besar pada bagian dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah penghasil. Dengan demikian, Pajak Bumi dan Bangunan perlu mendapat perhatian dalam pengelolaannya dari pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dalam pelaksanaannya berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga segala penelolaan dan peruntukannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, termasuk di Kota Banjar, salah satunya di Kecamatan Pataruman. Berdasarkan pengamatan di lapangan pengelolaan PBB di Kecamatan Pataruman belum mencapai target yang diharapkan. Dilihat dari kewajiban pokok ketetapan PBB dalam setiap tahun, perolehan realisasi penerimaan tiap tahunnya tidak stabil.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah (*Problem Statement*), yaitu rendahnya Kinerja Pegawai yang diduga disebabkan oleh belum dijalankannya unsur-unsur koordinasi secara penuh. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar?
2. Berapa besar pengaruh Koordinasi yang ditentukan Usur-unsur Koordinasi yang meliputi: Unsur Unit-unit, Unsur Sumber-sumber (potensi), Unsur Kesatupaduan, Unsur Gerak Kegiatan*,* Unsur Keserasian dan Unsur Arah yang sama (sasaran) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar?

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Menganalisis besarnya pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
2. Mengembangkan Unsur-unsur Koordinasi dan Dimensi-dimensi Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

## Kerangka Berpikir

Koordinasi pada hakekatnya adalah merupakan upaya penyatupaduan berbagai kegiatan maupun sasaran yang akan dicapai serta saling membantu dan mempunyai rasa tanggung jawab bersama terhadap bidangnya masing-masing dari setiap unit pada suatu unit kerja pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Pengertian koordinasi selanjutnya dikemukakan oleh Stoner dalam Sugandha (1991: 12) mengemukakan pengertian koordinasi sebagai berikut: “Koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang yang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”.

Pandangan tersebut memberikan penekanan bahwa koordinasi merupakan suatu usaha untuk menyatupadukan gerak dan langkah untuk mencapai tujuan agar tidak terjadi kesimpangsiuran pelaksanaan tugas setiap unit kerja dalam melaksanakan tugasnya. Untuk melihat sejauhmana tingkat pelaksanaan koordinasi tersebut, dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi sebagaimana dijelaskan oleh Sugandha (1991: 13) sebagai berikut:

1. Unit-unit atau kelompok-kelompok kerja di dalam suatu organisasi yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda.
2. Sumber-sumber atau potensi yang ada pada unit-unit suatu organisasi adalah tenaga kerja, keterampilan dan pengetahuan personilnya, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.
3. Kesatupaduan, artinya terdapat peraturan atau hubungan diantara sesamanya sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak.
4. Gerak kegiatan, adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh pejabat-pejabat maupun kelompok kerja dalam melakukan tugasnya.
5. Keserasian, artinya ada yang tersusun secara logis, sistematis atau dilakukan dalam waktu yang bersamaan akan tetapi tidak menimbulkan duplikasi (pengulangan) maupun pertentangan.
6. Arah yang sama, dalam hal ini sebagai pedoman adalah sasaran yang sudah ditetapkan berupa potensi sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Unsur-unsur yang dikemukakan di atas memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga bila suatu organisasi dalam melaksanakan usaha koordinasi memenuhi unsur-unsur di atas akan mendukung tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah dikemukakan tentang unsur-unsur koordinasi sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya dikemukakan pemahaman mengenai kinerja pegawai, menurut Mangkunegara (2004: 75) sebagai berikut: “Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Kinerja merupakan penampilan kerja atau hasil kerja dari seorang atau sekelompok orang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja secara optimal yang dapat dikatakan pula bahwa kinerja adalah hasil dari suatu proses pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Lebih lanjut John Miner dalam Sudarmanto (2009: 12) mengemukakan 4 dimensi kinerja pegawai sebagai berikut:

1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan dan kecermatan dalam bekerja.
2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau keluaran.
3. Penggunaan waktu, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan dan keefektipan kerja.
4. Kerjasama, yaitu kemampuan bekerjasama dengan orang lain, saling memahami dan pengertian.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa dua hal di atas terkait dengan aspek keluaran atau hasil pekerjaan yaitu kualitas dan kuantitas, sedangkan dua hal lainnya terkait aspek perilaku individu yaitu penggunaan waktu dan kerjasama. Keempat dimensi kinerja tersebut dapat dikatakan bertujuan untuk mengukur kinerja pada level individu. Setelah dijelaskan kerangka berpikir variabel Koordinasi dan Kinerja Pegawai, selanjutnya dikemukakan keterkaitan antara kedua variabel tersebut menurut Siagian (2002: 22) sebagai berikut: “Koordinasi merupakan kegiatan yang menyatukan bagian kegiatan yang berbeda-beda akan tetapi mempunyai tujuan yang saling berhubungan. Sasaran utama koordinasi adalah untuk menciptakan “*unity action*” yang pada gilirannya akan menjamin pada keterpaduan dalam meningkatkan kinerja pegawai secara menyeluruh”.

Pendapat di atas menunjukan bahwa koordinasi merupakan faktor penting yang dibutuhkan oleh suatu organisasi, termasuk organisasi publik dalam mendorong peningkatan kinerja pegawai secara menyeluruh. Untuk melihat hubungan keterkaitan variabel Koordinasi dan Kinerja Pegawai dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1

Paradigma Berpikir tentang Koordinasi dan Kinerja Pegawai

## Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka berpikir di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Besarnya Koordinasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.
2. Besarnya Koordinasi yang ditentukan oleh: Unsur Unit-unit, Unsur Sumber-sumber (potensi), Unsur Kesatupaduan, Unsur Gerak Kegiatan*,* Unsur Keserasian dan Unsur Arah yang sama (sasaran) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory survey*. Populasi dalam penelitian ini para Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Adapun jumlah responden pada penelitian ini yaitu 33 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu: (1) studi kepustakaan, yaitu studi dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan; (2) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan lapangan terhadap obyek penelitian secara non partisipan; (3) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya-jawab dengan Camat Pataruman; (4) Angket, yaitu teknik pengumpulan data primer yang diajukan kepada 33 pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan teknik sensus.

Sebelum angket digunakan dalam pengumpulan data, maka terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas-nya terhadap alat ukur (angket) penelitian yang akan dipergunakan. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor untuk setiap item dengan skor total melalui rumus korelasi *Person,* sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumusan koefisien alfa cronbach. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji model dan hipotesis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis)*.

## Hasil Penelitian

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan setiap angket telah menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai r atau nilai korelasi antara skors item dengan totalnya menunjukkan koefisien yang signifikan dan mempunyai nilai reliabilitas yang reliabel.

Penetapan Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y dan Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai X6 terhadap Y berdasarkan analisis jalur (*Path Analysis)* serta keterkaitannya dengan hipotesis penelitian yang dibangun sebelumnya, dirangkum pada gambar berikut ini:



Gambar 2

Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y

Gambar di atas memperlihatkan bahwa Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y sebesar 60,48%, sementara Pengaruh Langsung Variabel Lain (ε) terhadap Y sebesar 39,52%. Statistik uji yang digunakan adalah Statistik *F-Snedechor.* Hasilnyanilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis nol ditolak (signifikan), yang berarti bahwa sedikitnya ada satu koefisien jalur yang berpengaruh secara signifikan. Adapaun pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X1 sampai X6 terhadap Y ditunjukkan pada gamabar sebagai berikut:

Gambar 3

Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1

sampai dengan X6 terhadap Y

Kesimpulan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel X1 sampai dengan X6 sebagai Unsur-unsur Koordinasi terhadap variabel Y Kinerja Pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Kesimpulan Analisis Statistik

Variabel Koordinasi terhadap

Kinerja Pegawai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Xi** | **t hitung** | **t tabel** | **Kesimpulan** | **Ket.** |
| X1 | -0,059 | 1,671 | HO Diterima | Tidak Signifikan |
| X2 | -4,427 | 1,671 | HO Diterima | Tidak Signifikan |
| X3 | 3,623 | 1,671 | HO Ditolak | Signifikan |
| X4 | -1,323 | 1,671 | HO Ditolak | Tidak Signifikan |
| X5 | 3,184 | 1,671 | HO Ditolak | Signifikan |
| X6 | 3,165 | 1,671 | HO Ditolak | Signifikan |

Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2019.

## Pembahasan

Setelah diketahui hasil penelitian melalui analisis jalur (*Path Analysis*), maka selanjutnya dilakukan analisis tahapan pembahasan. Pembahasan pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja Pegawai dimaksud untuk mengungkapkan dan menjelaskan hasil penelitian serta menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, juga membahas hasil pengujian hipotesis dengan mengungkapkan temuan-temuan yang akan dibahas, baik pembahasan secara langsung (simultan) maupun tidak langsung (parsial)

1. **Pembahasan Pengaruh Simultan Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Koordinasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai secara optimal, yaitu 60,48%, artinya pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja Pegawai telah menunjukkan pengaruh besaran nilai yang signifikan sehingga bersifat positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Koordinasi telah dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dalam hal ini Camat Pataruman telah melakukan Koordinasi secara konsisten dan terprogram kepada seluruh unit kerjanya sesuai rencana kerja, sehingga Kinerja Pegawai Pemungut PBB dapat diketahui dari hasil kerja pegawai secara menyeluruh. Melihat kenyataan di lapangan pelaksanaan Koordinasi ini telah dilakukan dengan penuh kesungguhan oleh Camat sesuai dengan tujuan koordinasi, yaitu untuk meningkatkan Kinerja Pegawai secara menyeluruh. Atas dasar itu, dapat dinyatakan bahwa variabel Koordinasi sangat mendukung peningkatan Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Makna dari besaran nilai di atas, dapat diasumsikan bahwa semakin efektif pelaksanaan Koordinasi, semakin besar pula Kinerja Pegawai dan telah memberi kontribusi signifikan terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Keberhasilan Koordinasi yang dilakukan oleh Camat ini telah sesuai dengan visi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yaitu Meningkatkan Profesionalisme dalam Pelayanan Menuju Masyarakat yang Mandiri. Sedangkan misinya: (1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, (2) Meningkatkan aparat pemerintahan yang professional, dan (3) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Berkaitan dengan visi dan misi organisasi tersebut, maka sasaran yang telah dicapai antara lain: (1) Tercapainya sumber daya manusia Kecamatan Pataruman yang berpendidikan formal maupun non formal serta memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat, kontribusi dari keberhasilan para pemungut PBB dalam meningkatkan jumlah pemasukan melalui PBB secara tidak langsung telah memberikan pengaruh positif sehingga upaya pembaharuan data pendidikan formal dan non formal masyarakat bisa lebih optimal. (2) Tercapainya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan berdaya saing yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi untuk pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini aparatur kecamatan yang terkait dengan tugas-tugas pemungutan PBB telah diberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala serta dilakukan upaya standarisasi pelayanan minimal yang telah dirancang oleh Camat. (3) Tercapainya pembangunan yang sinergi, selaras dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif, swadaya dan gotong royong masyarakat, kontribusi efektivitas dan keberhasilan para pemungut PBB telah ikut berpengaruh positif pada pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini penambahan penghasilan dari persentase keberhasilan pemungutan pajak yang berdampak pada upaya kecamatan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, makna dari pelaksanaan Koordinasi tersebut menunjukkan bahwa Koordinasi memiliki peran penting bagi peningkatan Kinerja Pegawai Pemungut PBB. Keberhasilan ini memberi pengaruh bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dengan demikian, pengaruh secara simultan variabel koordinasi telah menunjukkan hasil yang valid dan potensial untuk meningkatkan Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

1. **Pengaruh Variabel Lain di luar Variabel yang Dikaji**

Selain variabel yang dikaji di muka, banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut di kemudian hari untuk memperkuat dan memperkokoh teori-teori yang telah dibahas dan dikembangkan dalam penelitian ini, pengaruh lain tersebut sebesar 39,52%.

Variabel lain yang berpengaruh ini mengingatkan bahwa variabel luar sama pentingnya dengan variabel yang telah dibahas dalam penelitian ini. Untuk itu variabel luar ini dapat dijadikan studi lanjutan dalam penelitian mendatang agar dapat menemukan hasil penelitian lebih luas dilihat dari berbagai variabel yang multivarian.

1. **Pembahasan Pengaruh Parsial Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar**

Pengaruh Koordinasi melalui Unsur Unit-unit terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka -0,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Unsur Unit-unit belum memberi makna positif pada kinerja pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Rendahnya pengaruh Unsur Unit-unit terhadap Kinerja Pegawai, karena pegawai pada unit kerja yang ada belum sepenuhnya menunjukkan keterampilan kerja yang diharapkan dan kurang tepatnya penyelesaian pekerjaan, sehingga unsur ini belum mampu memberi gambaran tentang penguasaan pekerjaan pada unit-uni kerja yang dimiliki pegawai secara menyeluruh.

Pengaruh Koordinasi melalui Unsur Sumber-sumber (potensi) terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 16,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Unsur Sumber-sumber (potensi) belum memberi makna positif terhadap kinerja pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Rendahnya pengaruh Unsur Sumber-sumber (potensi) terhadap Kinerja Pegawai, terlihat dari kemampuan dalam melaksanakan tugas belum sepenuhnya memenuhi keterampilan dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya dukungan fasilitas kerja yang memadai, sehingga pegawai belum mampu menyelesaikan tugas dengan tepat dan cermat.

Pengaruh Koordinasi melalui Unsur Kesatupaduan terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang signifikan berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 23,24%. Hal ini menunjukkan bahwa Unsur Kesatupaduan telah memberi makna positif pada kinerja pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Tingginya pengaruh Unsur Kesatupaduan terhadap Kinerja Pegawai, karena para pegawai telah mampu bekerjasama sesuai dengan irama kerja pada setiap unit kerja yang ada.

Pengaruh Koordinasi melalui Unsur Gerak Kegiatan terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan berdasarkan hitungan statistik dengan besaran nilai -5,52%. Hal ini menunjukkan bahwa Unsur Gerak Kegiatan belum mendukung terhadap peningkatan kinerja pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Rendahnya pengaruh Unsur Gerak Kegiatan terhadap Kinerja Pegawai ini, karena para pegawai belum mampu bekerja secara optimal dengan gerak kegiatan kerja secara serempak sesuai tugasnya.

Pengaruh Koordinasi melalui Unsur Keserasian terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang signifikan berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 13,63%. Hal ini menunjukkan bahwa Unsur Keserasian telah memberi makna penting pada Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Tingginya pengaruh Unsur Keserasian terhadap Kinerja Pegawai, karena para pegawai telah bekerja dengan penuh pengertian dan perhatian satu sama lain, sehingga hasil kerjanya sangat memuaskan.

Pengaruh Koordinasi melalui Unsur Arah yang sama terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang signifikan berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 13,11%. Hal ini menunjukkan bahwa Unsur Arah yang sama telah memberi makna positif bagi peningkatan kinerja pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Tingginya pengaruh Unsur Arah yang sama terhadap Kinerja Pegawai, karena para pegawai telah memiliki kesamaan pandangan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelian tentang pengaruh Koordinasi terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar, selanjutnya dapat disimpulkan hasil-hasil analisis dan pembahasan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel Koordinasi telah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dalam hal ini variabel Koordinasi ini merupakan variabel penting untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapai oleh Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Namun demikian masih ada variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara parsial Unsur-unsur Koordinasi yang terdiri dari unsur Unit-unit, Sumber-sumber (potensi), Kesatupaduan, Gerak Kegiatan*,* Keserasian dan Arah yang sama (sasaran) berpengaruh berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Namun hasil penelitian menunjukkan adanya variasi nilai yang tidak sama diantara unsur-unsur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga unsur Koordinasi yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai yaitu: unsur Unit-unit, unsur Sumber-sumber (potensi) dan unsur Gerak Kegiatan. Unsur-unsur ini belum memberikan makna positif bagi peningkatan Kinerja Pegawai, mengingat para pegawai belum memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan misi organisasi, sehingga menghambat proses penyelesaian pekerjaan. Sedangkan tiga unsur lainnya yaitu: unsur Kesatupaduan, unsur Keserasian dan unsur Arah yang sama (sasaran) telah menunjukkan pengaruh yang signifikan, karena para pegawai telah melaksanakan tugas dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

## Saran-saran

Berdasarkan temuan penelitian, disampaikan saran-saran peneliti sebagai kontribusi hasil penelitinan untuk meningkatkan Kinerja Pegawai pada Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Saran-saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. **Saran Akademik:**
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan Koordinasi dan Kinerja Pegawai, terutama yang terkait dengan variabel-variabel di luar variabel Koordinasi.
3. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mendukung hasil-hasil penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik di masa mendatang.
4. **Saran Praktis:**
5. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui Koordinasi khususnya ditinjau dari unsur-unsur yang belum memberikan pengaruh yang positif, yaitu unsur Unit-unit. Perbaikian dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan dan prosedur kerja yang sistematis dan tidak tumpang tindih pada setiap unit kerja.
6. Dilakukan upaya peningkatan kinerja dengan memperbaiki unsur Sumber-sumber (potensi). Perbaikan dapat berupa pemberian pelatihan-pelatihan ataupun workshop terhadap penggunaan fasilitas ataupun teknologi dalam bekerja.
7. Perlu dilakukan usaha-usaha pemecahan masalah untuk meningkatkan unsur Gerak Kegiatan, karena unsur-unsur ini belum dapat dijalankan dengan sepenuhnya oleh pegawai, sehingga perlu dibuat pedoman kerja yang tepat, agar para pegawai dapat bekerja sesuai dengan pedoman kerja yang ada.
8. **Saran Kebijakan:**

Guna pencapaian hasil kerja yang maksimal, sebaiknya Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar memiliki pedoman kerja tersendiri yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Koordinasi Pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) pada Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. **Administrasi dan Manajemen*.*** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Handayaningrat, Soewarno. 1991. **Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional**. Jakarta: CV Haji Masagung.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1995. **Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen.** Jakarta: Gunung Agung.

Kasim, M. 1994. **Analisis Kebijakan Negara.** Jakarta: Erlangga.

Mahsun, Mohammad. 2009. **Pengukuran Kinerja Sektor Publik.** Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mangkunegara, Anwar. 2004. **Manajemen Sumber Daya Perusahaan**. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nazir, Mohammad. 2011. **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1982. **Metode Penelitian Survai**. Jakarta: LP3ES.

Sudarmanto. 2009. **Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugandha, Dann. 1991. **Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi**. Jakarta: Intermedia.

Sugiono. 1992. **Metoda Penelitian Administrasi**. Bandung: Alfabeta.

**Dokumen-dokumen**

Peraturan Walikota Banjar Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Banjar.

Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

***\*)*** *Mahasiswa**Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.*